II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Implikasi

Menurut M Irfan Islamy dalam bukunya Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara (2002: 114-115) “Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998: 114) implikasi didefinisikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi atas temuan hasil suatu penelitian, akan tetapi secara bahasa memiliki arti sesuatu yang telah tersimpul di dalamnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka yang dimaksud dengan implikasi dalam penelitian ini adalah suatu akibat yang terjadi atau ditimbulkan dari suatu peristiwa yiatu implikasi konflik internal partai antara HT dan Surya Paloh dalam perspektif pengurus wilayah Provinsi Lampung.

B. Tinjauan Tentang Eksistensi

1. Pengertian Eksistensi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2002:357) “Eksistensi adalah keberadaan atau kehadiran yang mengandung unsur bertahan”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi adalah proses atau gerak untuk menjadi ada kemudian melakukan suatu hal untuk tetap menjadi ada.

2. Eksistensi Partai Politik

Eksistensi partai politik dalam sistem politik ditentukan oleh jumlah suara yang diperoleh pada pemilihan umum.Partai politik memperjuangkan untuk memperoleh suara dari masyarakat dalam pemilu untuk memperoleh eksistensinya.Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum adalah sebuah keputusan bagi seseorang apakah akan menggunakan hak pilihnya atau tidak dan akan memilih partai yang mana,dari sudut pandang pilihan rasional pemilih pertimbangan untung dan rugi, digunakan untuk membuat keputusan tentang partai politik atau kandidat yang akan dipilih.

Eksistensi partai sebagai keberadaan sebuah partai politik untuk memegang bagian dalam sistem politik karena kedudukan atau status yang dimilikinya. Keberadaan atau eksistensi partai politik dalam sistem politik ditentukan oleh jumlah suara yang diperoleh pada pemilu, sehingga penulis menganggap untuk mengukur eksistensi partai adalah dengan melihat upaya dari partai politik dalam memperoleh suara pada pemilu. Untuk memperoleh suara dalam pemilu diperlukan mesin partai yaitu kader yang hadir melalui proses rekrutmen. Rekrutmen partai politik dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui eksistensi sebuah partai politik. Merupakan suatu hal yang mutlak bagi partai politik untuk merekrut kader untuk berpartisipasi secara aktif dalam kampanye dan

mengajukan calon untuk menduduki posisi struktural dalam pemerintahan (pilkada) mereka harus mendapatkan simpati rakyat dengan menawarkan ide dan tujuan yang membuat mereka merasa bahwa mereka bagian dari proses politik (simbol integritas) dengan begitu mereka akan membentuk pemerintahan dan saluran internal untuk menghasilkan program yang memuaskan untuk sebagian besar warga negara (fungsi agregasi), (Scimitter (1999: 477-478), sementara menurut Subakti (2010: 151) rekutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan.Basis massa merupakan salah satu indikator eksistensi suatu partai, dimana loyalitas seorang konstituen pada sebuah partai ditentukan oleh identitas partai tersebut.

Menurut Anwar dan Salviana (2006: 28) identitas partai merupakan perasaan terikat pada kelompok dimana ia menjadi anggota maupun kelompok yang ia pilih. Loyalitas massa pendukung partai akan berpengaruh terhadap perolehan suara sebuah partai politik dalam pemilu, bahkan partai akan melakukan segala upaya agar loyalitas konstituenya tetap terjamin termasuk menggunakan cara-cara yang dianggap sesuai dengan situasi dan kondisi.

Aktor sentral dalam partai politik merupakan indikator eksistensi sebuah partai politik. Menurut Bima Arya aktor central dalam partai politik lebih penting bagi pemilih untuk menentukan partai apa yang dipilih ketimbang alasan-alasan lainnya seperti keyakinan agama, ideologi, etnis dan geografis.Dengan karakter pemilih Indonesia yang rata-rata masih

menyandarkan diri pada ketokohan personal dalam preferensi pilihan politiknya, untuk kebutuhan merebut simpati rakyat, kharisma dan popularitas citra figur tokoh adalah kekuatan referen partai politik di Indonesia.

Menurut Anwar dan Salviana (2006: 28) selain indikator yang telah disebutkan di atas strategi partai merupakan salah satu indikator eksistensi partai, berbagai strategi partai politik yang telah dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam platform partai atau dalam manifesto partai yang telah digariskan arah dan perjuangan partai untuk mencapai tingkat popularitas dalam memenangkan suatu pemilu yang berlangsung.

Salah satu konsep yang dapat digunakan untuk mengetahui eksistensi partai politik adalah dengan melihat institutionalisasi partai politik, yang dimaksud dengan institutionalisasi partai politik ialah situasi di mana terdapat stabilitas dalam kompetisi antar-partai, sehingga partai akan memiliki akar stabil di masyarakat, dan partai-partai yang berkompetisi dalam pemilihan umum diterima sebagai alat yang sah untuk menentukan siapa yang akan mengelolah pemerintah, dan partai memiliki aturan yang relatif stabil dan terstruktur (Mainwaring dan Scully, 1995;1).

Menurut Vicky Randall dan Lars Svasand (2002:13-14) ada empat kriteria untuk mengukur eksistensi partai politikyaitu:

1. **Derajat Kesisteman**

   Derajat kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan,

persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik. AD/ART partai politik dirumuskan secara komprehensif dan rinci sehingga mampu berfungsi sebagai acuan dan prosedur dalam melaksanakan semua fungsinya sebagai partai politik.

Derajat kesisteman suatu partai poilitik dapat dilihat dari asal-usul partai politik tersebut, apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah. Berikutnya siapakah yang lebih menentukan dalam partai, apakah seorang pemimpin yang disegani atau pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan organisasi sebagai suatu kesatuan. Siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan faksi-faksi dalam partai ataukah partai secara keseluruhan merupakan salah satu indikator derajat kesisteman suatu partai politik dan bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, apakah bersifat klientelisme atau pertukaran dukungan dengan pemberian materi atau menurut konstitusi partai (AD/ART).

2. Identitas Nilai

Identitas nilai merupakan orientasi kebijakan dan tindakan partai politik menurut ideologi atau platform partai. Identitas nilai seperti ini tidak hanya tampak pada pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan partai politik tetapi juga tampak pada basis sosial pendukungnya.Lapisan sosial atau golongan masyarakat memberi

dukungan kepada suatu partai karena mengidentifikasi orientasi politiknya dengan ideologi atau platform partai politik tersebut.

Indikator derajat identitas nilai suatu partai politik dapat dilihat dari bagaimana hubungan partai dengan kelompok masyarakat tertentu, apakah partai politik tersebut merupakan gerakan sosial yang didukung kelompok masyarakat tertentu, seperti buruh, petani, dunia usaha, kelas menengah, komunitas agama tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu, dan apa yang akan di dapat jika menjadi anggota partai tersebut apakah anggota tersebut akan mendapatkan materi ataukah partai politik tersebut dapat bertindak berdasarkan ideologi partai.

3. Derajat Otonomi

Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkait dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu yaitu penguasa, pemerintah maupun dengan sumber dana seperti pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar, dan sumber dukungan massa yaitu organisasi masyarakat.Pola hubungan suatu partai dengan aktor di luar partai dapat berupa hubungan ketergantungan kepada aktor luar, hubungan itu bersifat saling tergantung dan hubungan itu berupa jaringan yang memberi dukungan kepada partai.

4. Pengetahuan Publik

Pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam bayangan masyarakat

seperti dimaksudkan partai politik itu. Yang menjadi isu utama di sini bukan terutama tentang sikap masyarakat mengenai partai politik umumnya, tetapi tentang kiprah masing-masing partai politik bagi masyarakat. Bila sosok dan kiprah partai politik tertentu telah tertanam pada pola pikir masyarakat seperti dimaksudkan partai politik tersebut itu, maka pihak lain baik individu maupun lembaga di masyarakat akan menyesuaikan aspirasi dan harapannya atau sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik itu.

C. Tinjauan Tentang Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Menurut W.S.Poerwadarminta dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1990:227), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan persepsi adalah :

1. Tanggapan langsung dari suatu penerimaan
2. Proses seseorang mengetahui berbagai hal melalui panca inderanya.

Definisi persepsi menurut Sarlito Wirawan Sarwono dalam buku Teori-Teori Psikologi Sosial (1998:146) “Persepsi sebagai suatu kemampuan membeda-bedakan,mengelompokkan dan memfokuskan perhatian kepada suatu obyek.

Menurut Morgan King dan Robinson (1994:36), persepsi merujuk kepada bagaimana kita melihat,mendengar,merasakan,mengecap dan mencium dunia di sekitar kita. Dengan kata lain persepsi dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dialami oleh manusia.

Jack .L. Plano dkk dalam budaya politik dan pembangunan ekonomi (1982:148) mengatakan bahwa persepsi mencakup dua proses kerja yang saling berkaitan yaitu :

1. Melihat kesan melalui penglihatan, sentuhan dan inderawi lainnya.
2. Menafsirkan atau menetapkan arti dari pesan-pesan inderawi dengan struktur pengertian (keyakinan relevan yang muncul dari pengalaman masa lalu) seseorang dengan struktur evaluatif (nilai-nilai yang dipegang seseorang).

Sedangkan perspektif menurut Little John and Foss (2005:4) merupakan sudut pandang atau cara pandang terhadap sesuatu. Cara memandang yang digunakan dalam mengamati kenyataan untuk menentukan pengetahuan yang diperoleh. Perspektif berdasarkan pada konteks komunikasi menekankan bahwa manusia aktif memilih dan mengubah aturan- aturan yang menyangkut kehidupannya. Agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik individu-individu yang berinteraksi harus menggunakan aturan-aturan dalam menggunakan lambang-lambang. Bukan hanya aturan mengenai lambang itu sendiri, tetapi juga harus ada aturan atau kesepakatan dalam hal berbicara,bagaimana bersikap sopan santun atau sebaliknya,bagaimana harus menyapa,dan sebagainya,agar tidak terjadi konflik atau kekacauan. Perspektif ini memiliki dua ciri utama:

1. Aturan pada dasarnya merefleksikan fungsi-fungsi perilaku dan kognitif yang kompleks dari kehidupan manusia.
2. Aturan menunjukan sifat-sifat dari keberaturan yang berbeda dari keberaturan sebab akibat.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap suatu obyek di dalamnya menyangkut tanggapan mengenai kebenaran langsung atau keyakinan terhadap objek tersebut, pada akhirnya berpengaruh terhadap predisposisi seseorang untuk bertindak senang atau tidak senang yang merupakan jawaban atas pertanyaan apa yang dipikirkan atau dipersepsikan.

2. Faktor Penentu Persepsi

Menurut David Krech dkk dalam psikologi komunikasi (2005:110) ada dua faktor utama yang menentukan persepsi seseorang yaitu :

1. Faktor Fungsional

Faktor fungsional berdasar dari kebutuhan dan hal lain yang termasuk dari faktor personal. Persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik yang memberikan respon kepada stimuli itu. Faktor fungsional meliputi :

a. Kebutuhan
Kebutuhan sesaat dan kebutuhan menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi atau menentukan persepsi seseorang. Dengan demikian kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi.

b. Kesiapan mental
Suasana mental seseorang akan mempengaruhi persepsi seseorang.

c. Suasana emosi
Suasana emosi seseorang baik dalam keadaaan sedih, bahagia, gelisah maupun marah akan sangat mempengaruhi persepsinya kepada suatu obyek masalah.

d. Latar belakang budaya
Latar belakang budaya dimana seseorang berasal, akan mempengaruhi dan menentukan persepsi seseorang tersebut kepada suatu obyek rangsangan.

2. Faktor Struktural

Faktor struktural semata-mata berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem individu meliputi antara lain :

a. Kemampuan berfikir

b. Daya tangkap inderawi

c. Seluruh daya tangkap yang ada pada manusia

Pada penelitian ini peneliti hanya fokus pada faktor structural sebagai pembentuk persepsi para pengurus wilayah Partai Nasdem.

D. Tinjauan Tentang Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Menurut Kamus Bahasa Indonesia definisi partaiadalah sebagai berikut: "Partai adalah sekelompok orang yang seasas, sehaluan terutama di bidang politik".

Definisi Politik Menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik sebagai berikut: "Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (ataunegara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu (Miriam Budiarjo, 2002:8)".

Berdasarkan definisi partai dan politik di atas,definisi mengenai partai politik sebagai berikut, menurut Miriam Budiarjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik mengemukakan bahwa:

"Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, dimana tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Miriam Budiarjo, 2002:160)".

Partai politik menurut Mochtar Mas'oed & Collin Mc. Andrews dalam buku *Perbandingan Sistem Politik* (1989:16) adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan kedudukan politik yang biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Rusadi Kantaprawira dalam buku Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar (1999: 48) mendefinisikan partai politik sebagai sebuah organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas-petugas untuk mencapai suatu tujuan, ia memiliki ideologi, program politik sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan yang lebih pragmatis mencakuppentahapan jangka pendek sampai dengan jangka panjang serta berkeinginan untuk berkuasa.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan-kesamaan tujuan dan bersatu dalam sebuah lembaga atau organisasi politik, yakni organisasi yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan menguasai pemerintahan semata-mata agar kebijaksanaan yang dibuat akan berjalan sebagaimana mestinya, dengan cara menempatkan anggota atau kader-kadernya sebagai penentu kebijakan pada lembaga-lembaga politik, baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif.

2. Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik menurut Miriam Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik(2002:163), yaitu:

1. Partai sebagai sarana Komunikasi Politik.

Salah satutugasdari partai politikadalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di pandang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan "penggabungan kepentingan" *(interest aggregation)*. Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan "perumusan kepentingan" *(interest articulation)*.

2. Partai sebagai sarana Sosialisasi Politik.

Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik di dalam lingkungan masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus-kursus kader, kursus penataran, dan sebagainya.

3. **Politik sebagai sarana Rekrutmen Politik.**

   Partaipolitikjugaberfungsi untuk mencari dang mengajakorang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai *(political recruitment*). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik.Caranyaialahmelaluikontakpribadi, persuasidan lain-lain.Juga disuahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama *(selection of leadership)*.

4. **Politik sebagai sarana pengatur konflik.**

   Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.

Fungsi Partai Politik menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik(1992:116), berpendapat bahwa fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi utama tersebut terdapat fungsi lain yang dilaksanakan oleh partai politik, yaitu :

1. Fungsi sosialisasi politik.
2. Fungsi rekrutmen politik.
3. Fungsi partisipasi politik.
4. Fungsi pemandu kepentingan.
5. Fungsi komunikasi politik.

6. Fungsi pengendalian konflik.
7. Fungsi kontrol politik.

Dari beberapa hal mengenai fungsi dari partai politikdi atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam negara demokratis fungsi partai politik cenderung mencari atau merekrut massa sebesar-besarnya dan hanya mementingkan kepentingan individu/kelompok. Tetapi fungsinya sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan pemerintah dan sebagai pengendali konflik belum terealisir secara maksimal.

3. Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011

Pada Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011Pasal 32 berbunyi:

Pasal 32

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.

(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

E. Konflik Internal Partai

1. Pengertian Konflik

Istilah konflik dalam ilmu politik sering kali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Oleh Ramlan Subakti (1992:149) dikatakan, “konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu

dan individu, kelompok dan kelomppok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah.

Teori Paul Conn, "*Conflict an Decision Making : An introduction to Political Science*", yang dikutip oleh Ramlan Surbakti (1992:8), bahwa pada dasarnya politik adalah konflik, karena konflik merupakan gejala yang selalu hadir dalam masyarakat termasuk dalam setiap proses politik. Menurut pandangan ini, ada diantara pihak yang berupaya mendapatkan nilai-nilai dan mereka yang berusaha keras mempertahankan apa yang selama ini telah mereka dapatkan, antara pihak yang sama-sama juga mempertahankan nilai-nilai yang selama ini mereka kuasai.

Menurut K.W. Thomas yang dikutip oleh Stephen P.Robbins (1996:124) dalam bukunya "*Perilaku Organisasi*", berpendapat bahwa konflik merupakan suatu proses yang mulai bila satu pihak merasakan bahwa suatu pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, atau akan segera, sesuatu yang diperhatikan pihak pertama.

Sedangkan menurut Arraq Steinberg (1981:71), konflik adalah :

> "Suatu proses yang kuat sekali untuk hasil yang diharapkan maupun hasil yang tidak diharapkan. Hasil yang diharapkan termasuk menciptakan gagasan-gagasan baru dan unggul, yang memaksa orang untuk mencari pendekatan-pendekatan baru dan menguji kemampuannya. Hasil yang tidak diharapkan termasuk mencipatakan jarak antara orang-orang, menumbuhkan rasa curiga, serta membuat mereka terasa dihina dan dikalahkan".

Konflik politik yang berkaitan dengan permasalahan mengenai konflik yang terjadi di dalam organisasi politik atau partai politik, merupakan suatu pertentangan yang terjadi dalam individu dengan individu, atau

individu dengan kelompok yang bertujuan untuk mencapai ambisi dan tujuan bersama melalui berbagai macam cara yang ditempuh. Meskipun politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang, meskipun politik juga menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan orang seorang (individu).Hal inilah yang dapat menyebabkan timbulnya suatu konflik baik secara internal didalam partai itu sendiri terhadap masing-masing anggota partainya, maupun secara eksternal terhadap partai lain untuk melakukan bargaining atau koalisi partai. Namun dalam kaitannya dengan penelitian ini, konflik partai politik secara internal yang terjadi didalam Partai Nasdem dan Harry Tanoe.

2. Konflik Internal Partai

Proses sosial didalam masyarakat yang demokratis, perbedaan pendapat dan persaingan di antara warga masyarakat atau golongan-golongan merupakan hal yang wajar. Perbedaan pendapat dan persaingan itu sering kali mengakibatkan konflik, bahkan mengakibatkan terjadi perpecahan.

Konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : 1) Percecokan, pertentangan; 2) Ketegangan atau pertentangan antara dua kekuatan atau dua tokoh.

Menurut Nazuruddin Sjamsuddin, Zukifli Hamid, dan Toto Pribadi (1988:56) perpecahan dalam partai politik bisa disebabkan tiga hal, yaitu:

1. Perbedaan ideologi dari para anggotanya, karena partai tidak memeliki *platform* yang jelas, sehingga mengakibatkan tidak adanya

ikatan ideologis di antara anggota partai. Ketika terjadi perpecahan yang bersifat klik, personal atau kelompok, dengan mudah hal itu memecah belah partai

2. Perbedaan pelaksanaan kebijaksanaan, dipandang dari proses regenerasi yang harus dilakukan, kegagalan muncul tokoh baru dalam parpol menunjukan kegagalan parpol melakukan reformasi internal, terutama untuk revitaslisasi dan regenerasi terutama karena figur petingginya menjadi simbol institusi.
3. Persaingan kepemimpinan dalam partai, faktor kepemimpinan tunggal dan manajemen yang buruk. Terlalu kuatnya figur pemimpin parpol berpotensi mematikan kaderisasi di tubuh partai politik bersangkutan. Figur yang kuat seringkali dianggap mampun menjadi perekat sementara pada saat bersamaan kader yang memiliki kualifikasi sepadan tidak pernah dipersiapkan sebagi calon pengganti.

Kutipan skripsi oleh Ridwan Muhammad (1999:37), Synder memandang bahwa konflik yang terjadi dalam internal suatu partai politik disebabkan persoalan pembatasan posisi yang dapat diisi dalam suatu sistem. Tentunya, makin sedikit posisi yang bisa diisi, tingkat persaingan untuk mendapatkannya makin tinggi pula. Akibatnya semakin tajam pula tingkat konflik diantara individu atau kelompok untuk merebut posisi atau sumber-sumber tersebut. Artinya apabila sumber-sumber tersebut tidak seimbang dengan kondisi anggota/kelompok masyarakat yang ada dan menginginkan sumber-sumber itu, maka kemungkinan berkembangnya suatu konflik yang semakin besar.

Beberapa dari pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat penulis simpulkan tentang defenisi atau konsep dari konflik internal partai sebagai pertentangan, perdebatan atau persaingan untuk mempengaruhi, mendapatkan dan/atau mempertahankan nilai-nilai baru, ide tau pemikiran yang dimiliki di dalam sebuah organisasi partai politik yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda bahkan sama.

F. Kerangka Pikir

Dalam kehidupan bernegara di negara yang berdemokrasi seperti Indonesia, partisipasi politik dari warga negara sangat berperan dalam pelaksanaan demokrasi dan modernisasi politik. Untuk melakukan hal tersebut perlu sebuah wadah yang bernama partai politik yang mempunyai fungsi sebagai salah satu alat untuk melakukan partisipasi politik. Partai Nasdem juga dapat dikatakan sebagai partai politik yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

Partai Nasdemadalah partai yang dibentuk sebagai alat perjuangan baru agar demokrasi di indonesia menemukan kesejatiannya, dan bukan sekedar praktek formal prosedural semata, tetapi demokrasi yang berujung pada kesejahteraan rakyat. HT sebagai salah satu warga negara indonesia mempunyai hak untuk berpartisipasi politik dengan melalui media bernama partai politik sehingga ia masuk dalam partai Nasdemdan menjadi ketua dewan pakar di partai tersebut. Tetapi akhirnya HT keluar dari partai tersebut dan bergabung ke Partai

Hanurakarena bertentangan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Partai Nasdem tersebut yang mengakibatkan suara para pengurus Partai Nasdem terbelah.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai landasan penelitian ini adalah sebagaimana teori Menurut M IrfanIslamy (2002,114-115), implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah sebab-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.Bertitik tolak dari semua pemikiran tersebut, maka penulis ingin menggambarkanbagankerangka pikir tentang analisis implikasi mundurnya HT adalah:

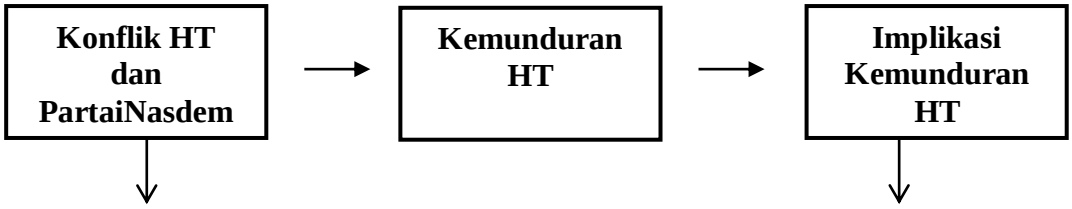

Faktor Individual:

- Perbedaan pandangandalam pengisianjabatan KetuaUmum
- Perbedaan Kepentingan AntarPengurus DPWPartai NasdemLampung

Faktor Kolektif:

- FaksionalismeInternal

↓

Implikasi pengunduran diri HarryTanoesodibjoterhadap eksistensi Partai Nasdem dari perspektif pengurus wilayah Provinsi Lampungmenurut Vicky Randall dan Lars Svasand (2002:13-14) (1998:220)

1. Derajat Kesisteman
2. Identitas Nilai
3. Derajat Otonomi
4. Pengetahuan Publik

Bagan 1. Kerangka Pikir